

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem *e-procurement* atau pengadaan barang/ jasa secara elektronik melalui internet di Indonesia pada perspektif pemerintah dipercaya sebagai alat/instrumen untuk mewujudkan *good governance* dan pelayanan publik, karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket pekerjaan yang dilelang, menyediakan publik monitoring yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Setelah diberlakukannya sistem ini, pengeluaran negara dalam hal pengadaan barang/jasa diprediksi dapat ditekan hingga Rp 40 triliun pertahun (Situs Tempo, 2007).

Namun dalam beberapa hal, pelaksanaan *e-government procurement* (e-GP) di Indonesia tidaklah mudah. Banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, baru-baru ini sistem lelang melalui internet di berbagai daerah di Indonesia dikeluhkan para pengusaha penyedia barang/jasa konstruksi. Mereka mendesak pemerintah untuk menunda sistem *e-procurement* di tahun 2008 dengan alasan banyak terjadi penyalahgunaan *e-procurement*, termasuk SDM dan pelaksana operasional (Situs Tempo, 2007). Menurut penelitian yang telah dilakukan, sistem lelang elektronik memang belum dapat dilaksanakan secara optimal pada saat ini karena belum dipenuhinya 3 prasyarat pelaksanaan dari pemerintah, yaitu syarat hukum pelaksanaan (belum siapnya payung hukum), syarat teknis pelaksanaan/tingkat kemampuan teknologi dan syarat manajemen /tingkat kemampuan sumber daya manusia (Gokmauli,F, 2008)

Dari sisi penyedia jasa konsultasi, keberhasilan dalam mengikuti sistem lelang adalah salah satu faktor penentu kelangsungan hidup perusahaan. Penerapan lelang secara elektronik pada saat ini seharusnya sudah jadi kebutuhan bagi perusahaan konsultasi, mengingat manfaatnya yang cukup banyak dibandingkan dengan cara konvensional, yaitu terjadinya peningkatan efisiensi dalam hal meminimalkan waktu pelaksanaan, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan manajemen informasi ke seluruh area pembelian.

Namun, walau telah disadarinya akan hal tersebut, di Indonesia baru sedikit konsultan yang mau dan dapat melaksanakan *e-procurement*. Salah satu alasannya karena terbatasnya kemampuan sumber daya serta ketersediaan teknologi (Fitria, A.M, 2006).

Belum banyak penelitian di Indonesia yang mengemukakan apa hambatan yang dihadapi bila sebuah perusahaan penyedia jasa konsultasi mengikuti pelelangan elektronik. Namun di beberapa negara di Eropa telah dilakukan survei/penelitian untuk mengetahui hambatan (*barrier*) juga manfaat (*driver*) pelaksanaan pelelangan secara elektronik. Salah satu penelitian yang menelusuri semua item manfaat dan hambatan di Eropa adalah penelitian yang dilakukan oleh Robert Eadie et.al tahun 2007. Penelitian ini mengacu dari kondisi yang terjadi di beberapa negara yang telah melakukan *e-procurement*. Penelitian ini lebih lanjut memberikan daftar manfaat & hambatan *e-procurement* yang dialami penyedia barang/jasa yang melakukan kerjasama pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan pemerintah di negaranya tersebut. Berdasarkan penelitian ini, Indonesia dapat mememanfaatkannya sebagai acuan dan sumber informasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut, untuk mengetahui hambatan yang dapat dialami oleh perusahaan penyedia jasa konsultasi dalam melakukan pelelangan elektronik yang optimal, sehingga tujuan efisiensi dan efektifitas yang diinginkan oleh perusahaan dapat tercapai.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Sistem pengadaan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah baru menggunakan sistem pengadaan semi *e-procurement plus*, *e-procurement copy to internet* sehingga untuk menuju *full e-procurement* masih banyak hal yang harus dibenahi, telah diketahui banyak keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemerintah dan perusahaan penyedia jasa apabila mampu melakukan lelang secara elektronik (*e-procurement*). Sebagai contoh, penelitian di Inggris menyebutkan bahwa industri konstruksi di negara tersebut dapat menghemat biaya pelaksanaan proyek sebesar 10% setiap tahunnya dengan menerapkan *e-procurement* (Latham,

M, 1994). Sama halnya dengan Indonesia, membutuhkan sistem yang mampu meminimalisir penyimpangan dan mampu melakukan penghematan anggaran negara pada proses penyelenggaraan barang/jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Rino A. Nugroho, 2006, dapat dijadikan Sebagai contoh, penyimpangan anggaran yang terjadi di Departemen Pekerjaan Umum. Temuan penyimpangan ini dapat dilihat dalam tabel 1.1, Kebocoran Anggaran Departemen Pekerjaan Umum :

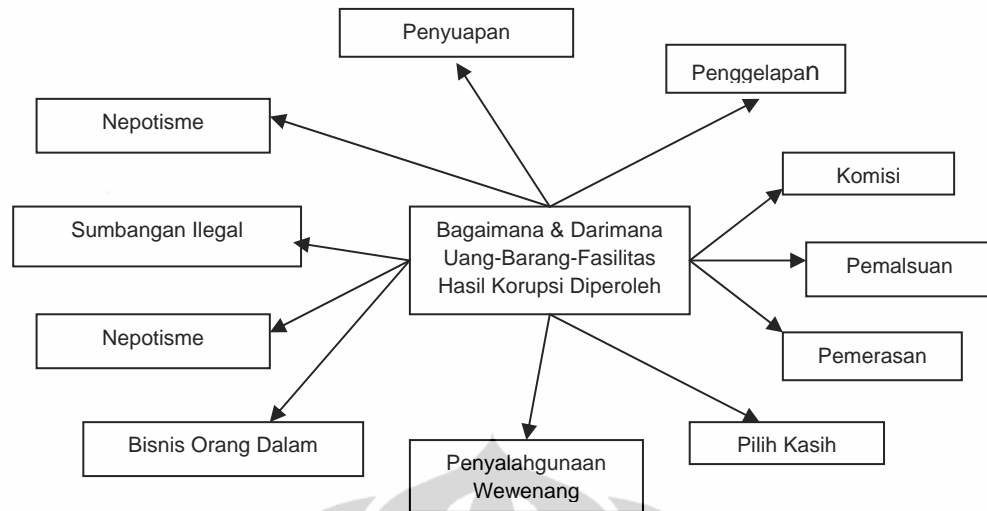
Tabel 1.1 Kebocoran Anggaran Dep.PU 2002-2004

Tahun Anggaran	Persentase Kebocoran Anggaran
2002	3,30%
2003	2,41%
2004	0,26%
Rata-rata	1,99%

Sumber : *Explanatory e-GP in the Departement of Public Work*, 2006.

Rata-rata anggaran Departemen Pekerjaan Umum untuk tahun anggaran 2002-2004 adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- dengan demikian rata-rata kebocoran anggaran Departemen Pekerjaan Umum tahun 2002-2004 adalah sebesar Rp.199.000.000.000,-.

Sistem pelaksanaan lelang secara konvensional dianggap masih belum mampu untuk menekan kebocoran yang terjadi disebabkan karena seringnya terjadi tatap muka secara langsung antara pengguna jasa dan penyedia jasa pada proses pelelangan barang/jasa, sehingga sangat besar peluang bagi orang-orang yang terkait pelelangan dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan, seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Bentuk korupsi dalam PBJ

(Indonesian Procurement watch,2005)

"E-procurement will bring improvements to all aspects of the procurement process" (Minahan & Degan, 2001). *E-procurement* akan membawa perbaikan ke semua aspek dari proses *procurement*. Proses *e-procurement* tidak semata mata hanyalah tentang pengadaan barang/jasa tetapi juga menyangkut strategi-strategi dalam pengadaan tersebut (Egbu et.al, 2004). Sektor publik di negara tersebut telah menyelidiki cara untuk mengembangkan strategi dan proses *e-procurement* selama lebih dari 11 tahun. Namun walaupun telah disadari keuntungan-keuntungannya, penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa dalam penerapannya, dokumen tender yang dikirim dalam bentuk format elektronik masih kurang dari 30% dari total seluruh pelaksanaan lelang di negara tersebut (Martin, J, 2003).

Di Indonesia, contoh positif dari pelaksanaan *e-procurement* adalah pelaksanaan sistem EPRO (*Elektronik Procurement Rekayasa Online*) yang dilakukan oleh PT Rekayasa Industri, dimana pelaksanaannya berhasil meminimalkan waktu pelaksanaan, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan manajemen informasi ke seluruh area pembelian. Namun hambatan paling utama dalam penerapan EPRO adalah sangat bergantungnya sistem tersebut pada jaringan infrastruktur teknologi informasi yang dapat mengakibatkan kinerja karyawan akan terganggu apabila sistem *down*. Serta masih dibutuhkannya pelatihan-pelatihan untuk menerapkan sistem ini kepada

para staf yang terkait agar menjalankan sistem ini secara optimal (Fitria, A.M, 2006).

1.2.2 Signifikansi Masalah

Penelitian ini akan meninjau hambatan yang dihadapi penyedia jasa pada saat mengikuti pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*), ada 3 (tiga) aspek hambatan yang akan dibahas pada penelitian yaitu : aspek hukum, aspek manajemen penyedia jasa dan aspek teknis pelaksanaan yang berpengaruh pada penyedia jasa.

Bell (2006) mengatakan bahwa Prinsip dari pelelangan elektronik adalah untuk menyediakan sistem yang lebih mendekati sempurna dalam proses input dari penawaran penyedia jasa konsultasi, dengan jalan mengurangi inefisiensi, keterlambatan (mulainya pelaksanaan), dan biaya (yang tidak perlu) yang umumnya ada pada proses tender manual dengan cara pencatatan berulang-ulang. Karena itu penerapan solusi elektronik memang harus mulai digunakan, apabila perusahaan ingin menjadi unggul dan tetap bertahan dalam kompetisi di era baru ini. Keuntungan dari sisi pemerintah apabila menerapkan pelelangan elektronik adalah terciptanya pemerintahan yang transparan, terbuka, adil, efektif dan akuntabel.

Namun menilik dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang masih terjadi berbagai masalah, maka harus dikenali dahulu karakteristik hambatan hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi kelayakan pelaksanaannya tersebut.

1.2.3 Rumusan Masalah

Pelelangan Elektronik di Indonesia memiliki banyak manfaat, namun penerapannya ternyata masih sangat kurang, hal ini diakibatkan karena pelaksanaan *e-procurement* juga memiliki banyak hambatan, contohnya investasi teknologi yang masih tergolong mahal, (warta *e-gov*, 2007). Penelitian yang dilakukan sebelumnya di Indonesia sebatas kajian *e-procurement* dari perspektif *owner* ataupun studi kasus pelaksanaan *e-procurement* pada suatu perusahaan konstruksi tertentu. Tentu saja daftar hambatan yang didapat dari studi tersebut

sangat subyektif, hanya sebatas kendala yang dihadapi perusahaan yang diteliti tersebut. Penelitian ini akan memanfaatkan Hambatan (*barrier*) pelaksanaan *e-procurement* dari sudut pandang penyedia jasa konsultasi pada pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi secara elektronik, literatur telah didapat melalui penelitian di Eropa, diharapkan dapat dijadikan sumber acuan penelitian di Indonesia agar didapat gambaran umum hambatan pelaksanaan pelelangan elektronik yang terjadi di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui analisa pakar yang mempertimbangkan aspek-aspek hambatan yang dapat berpengaruh terhadap penerapan *e-procurement* di Indonesia yang sampai saat ini masih melakukan semi *e-procurement*.

Penelitian ini lebih lanjut akan mendata persiapan apa saja yang diperlukan untuk dapat melaksanakan *e-procurement* melalui pendapat pakar, lalu dianalisa pengaruh hambatan tersebut pada pelaksanaan *e-procurement* tersebut terhadap penerapannya pada penyedia jasa konsultasi dan memberikan rekomendasi tindakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Hambatan apa yang terjadi pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) terhadap penyedia jasa.
2. Bagaimana mengatasi hambatan yang kuat berpengaruh pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) terhadap penyedia jasa.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi hambatan pada proses pengadaan barang/jasa konsultasi secara elektronik (*e-procurement*) terhadap penyedia jasa.
2. Merekomendasikan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang kuat berpengaruh pada proses pengadaan barang/jasa konsultasi secara elektronik (*e-procurement*) terhadap penyedia jasa.

1.4 Batasan Penelitian

Dengan banyaknya tinjauan yang dapat dibahas dalam penelitian pada pelelangan elektronik (*e-procurement*) ini, maka pada penelitian ini Penulis memberi batasan pada :

1. Sudut pandang penelitian adalah pelaksanaan pada pengadaan jasa konsultasi secara elektronik (*e-procurement*) dari sisi penyedia jasa konsultasi dan pihak yang terkait pada pelaksanaan pelelangan secara elektronik (*e-procurement*), 3 (tiga) aspek yang akan ditinjau adalah aspek manajemen konsultan, aspek hukum dan aspek teknis pada saat dilakukannya proses pengadaan barang/jasa konsultasi secara elektronik (*e-procurement*).
2. Penelitian dilakukan dilingkungan Departemen PU, sampel yang diambil adalah pada pelaksanaan *e-procurement* yang dilakukan di Direktorat Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, SNVT Jalan dan jembatan Metropolitan pada tahun anggaran 2007, dengan alasan bahwa Bina Marga sebagai instansi publik yang menangani proyek-proyek jalan dan jembatan merupakan salah satu pelopor penggunaan *e-procurement* di Indonesia. Pengambilan data pada tahun tersebut karena, pelaksanaan *e-procurement* dianggap sudah cukup optimal dilaksanakan pada tahun anggaran 2007.
3. Model sistem yang dipakai adalah G2B (*Government to Business*).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi :

1. Pemerintah, sebagai penentu kebijakan pelaksanaan *e-procurement*, agar menjadi acuan pada saat pembuatan Undang-undang dan teknis pelaksanaan mengenai *e-procurement* di Indonesia.
2. Perusahaan konsultasi, sebagai pedoman dalam mempersiapkan perusahaan ketika akan mengikuti pelelangan elektronik (*e-procurement*).
3. Perusahaan Swasta lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik baik internal maupun external perusahaan.

1.6 Keaslian Penelitian

Ada beberapa penelitian mengenai hambatan dalam *e-procurement*, yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu antara lain :

Dalam Negeri :

1. Florence Gokmauli, Kajian kelayakan pelaksanaan sistem lelang elektronik (*e-procurement*) pada instansi pemerintah ditinjau dari prasyarat pelaksanaan, Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2008, yang berisi tentang kajian kelayakan pelaksanaan *e-procurement* ditinjau dari kesiapan undang-undang, teknologi dan sumber daya manusia. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah sistem *e-procurement* sangat bergantung kepada jaringan infra struktur teknologi informasi yang dapat mengakibatkan kinerja perusahaan terganggu apabila sistem *down*.
2. Andria Muharami Fitria, Manfaat penerapan *electronic procurement* rekayasa *online* (EPRO) pada pelaksanaan proyek konstruksi (studi kasus PT: X), Skripsi Fakultas teknik Universitas Indonesia, 2006. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan e-procurement di Departemen Pekerjaan Umum belum bisa optimal dilaksanakan karena belum tersedianya 3 (tiga) prasyarat penerapan yaitu : aspek hukum, aspek manajemen dan aspek teknis.

Luar Negeri :

1. Robert Eadie, et al, *Drivers and Barriers to Public Sector E-Procurement Within Northern Ireland's Construction Industry*, Itcon Journal Vol 12 (2007), Published : Februari 2007 <http://itcon.org/2007/6/>, yang berisi tentang penelitian yang bertujuan mencari manfaat dan hambatan pelaksanaan e-procurement yang dilakukan oleh RSNI (*Road Service Northern Ireland*), merangkingnya dan melakukan analisa perbandingan terhadap manfaat dan hambatan dari negara lain. Hasil penelitian ini adalah hambatan dan manfaat dari penerapan e-procurement di negara irlandia pada sektor industri konstruksi.
2. Robert Eadie, et al, *Identifying and Confirming Drivers and Barriers to E-Procurement in Construction Organisations*, MIS IT & ICT Papers Bears

Conference in Srilangka, 12-15 February, 2007, yang berisi tentang penelitian di Inggris, yang bertujuan mencari manfaat dan hambatan pelaksanaan *e-procurement* dengan menggunakan metode Delphi (analisa pakar), dimana variabel-variabelnya diambil dari manfaat dan hambatan pelaksanaan *e-procurement* pada industri umum lainnya.

3. Rino A. Nugroho, *Explanatory Study of electronic Government Procurement in the Departement of Public Work*, 2006, yang berisi tentang penelitian kebocoran anggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kemudian mencari metode pelelangan barang/jasa elektronik yang paling efisien dalam mengurangi penyimpangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk mengimplementasikan sistem pengadaan barang/jasa melalui internet, ternyata mampu mengatasi kebocoran anggaran Departemen tersebut

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini mengidentifikasi variabel hambatan yang mungkin terjadi pada penyedia jasa konsultasi pada penerapan pengadaan barang/jasa elektronik di Departemen Pekerjaan Umum melalui studi literatur dan kemudian divalidasi oleh pakar. Selanjutnya penelitian ini akan mengupayakan rekomendasi tindakan (*corrective action*) agar hambatan-hambatan tersebut bisa diatasi oleh penyedia jasa konsultasi.

1.7. Sistematika Penelitian

Penyajian tulisan penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan penelitian yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi, batasan dan rumusan masalah, serta menjelaskan tentang maksud, tujuan, manfaat dan kontribusinya maupun sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori yang berhubungan dengan penelitian agar dapat memberikan gambaran tentang pengadaan jasa konsultasi secara elektronik (*e-procurement*).

BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini membahas metodologi penelitian yang digunakan, dimulai dari kerangka pikir yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan hipotesa, uraian umum tentang pemilihan metode penelitian, kerangka metode penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisa.

BAB 4 Pengumpulan Dan Analisa Data

Bab ini menjelaskan mengenai pengumpulan data, pentabulasian data dan analisa data.

BAB 5 Hasil Penelitian Dan Bahasan

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut.

BAB 6 Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat dihasilkan dari penelitian ini.